ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MERANGIN

Roudoh[1], Augina Patricia Maysara[2], Dwinar Maricha Anggraini[3], Cantika Mukti Andini[4], Nur Kamila Hadia Rahmah[5], Okta Riansyah Al Rahman[6]
[1,2,3,4,5,6]Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[1]raudhoh@uinjambi.ac.id,[2]patriciaaugina06@gmail.com,
[3]dwinaranggraini@gmail.com, [4]cantikadini957@gmail.com,
[5]nurkamilahadia@gmail.com, [6]oktariansyah845@gmail.com

ABSTRACT

The Merdeka Belajar policy is one of the strategic educational reforms introduced by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology to improve educational quality through student-centered learning, curriculum flexibility, and teacher competency development. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Belajar policy in improving the quality of education at State Senior High School 2 Merangin, identify the supporting and inhibiting factors, and describe the school's efforts to optimize its implementation. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the principal, vice principal for curriculum, teachers, and students. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña model, including data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that the implementation of the Merdeka Belajar policy has been carried out effectively through differentiated learning, the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5), diagnostic assessment, and continuous teacher professional development. The policy has positively influenced the quality of learning, teacher competence, students' learning motivation, and collaborative school culture. However, several challenges remain, including limited supporting facilities, varying levels of teachers' digital competence, and adaptation to new learning paradigms. Therefore, strengthening teacher capacity, improving educational facilities, and ensuring continuous support from stakeholders are essential to optimize the implementation of the Merdeka Belajar policy and improve educational quality.

***Keywords**: educational quality, merdeka belajar, policy implementation*

ABSTRAK

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan salah satu kebijakan strategis yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas kurikulum, serta penguatan kompetensi guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Merangin, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan sekolah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin telah berjalan dengan cukup baik melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), asesmen diagnostik, serta peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Implementasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, motivasi belajar peserta didik, dan budaya sekolah yang lebih kolaboratif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pendukung, kemampuan digital sebagian guru, serta proses adaptasi terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru, penguatan fasilitas pembelajaran, dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar implementasi Merdeka Belajar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, merdeka belajar, mutu pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang bermutu, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, karakter, serta nilai-nilai yang dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhsam et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional

sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperkenalkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya mentransformasi sistem pendidikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kebijakan ini menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), memberikan keleluasaan kepada guru merancang proses pembelajaran, serta mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, implementasi Merdeka Belajar melalui penerapan Kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, serta Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Manurung et al., 2026).

Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya sekolah yang mendukung pembelajaran. Dalam konteks tersebut, implementasi kebijakan Merdeka Belajar diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pembelajaran yang lebih inovatif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21 (Neliwati et al., 2026). Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi sekolah, serta kemampuan sekolah dalam mengelola perubahan.

SMAN 2 Merangin merupakan salah satu sekolah yang telah mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Sekolah ini telah menerapkan berbagai program yang mendukung Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berdiferensiasi, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pengembangan komunitas belajar guru, serta pelaksanaan asesmen yang lebih berorientasi perkembangan peserta didik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan menghadapi tantangan, perbedaan tingkat kesiapan guru, keterbatasan pemanfaatan teknologi, kebutuhan peningkatan kompetensi menerapkan pembelajaran yang inovatif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan kompetensi guru. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada sekolah yang memiliki karakteristik berbeda dengan SMA Negeri 2 Merangin. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan pada konteks sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 2 Merangin, mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan kebijakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Merangin. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pelaksanaan kebijakan, faktor yang memengaruhi implementasinya, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan.

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi**.** Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan berbagai program pendukung Merdeka Belajar sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling***,** yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Informan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, beberapa guru mata pelajaran, serta peserta didik.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi**,** wawancara, dan dokumentasi**.** Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan

pelaksanaan program Merdeka Belajar di sekolah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, dokumen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model Milles et al., (2021) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang baik.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin dilaksanakan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sekolah telah menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang mengacu pada prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Penyusunan kurikulum dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan sehingga kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik.

Dalam proses pembelajaran, guru mulai menerapkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Guru memberikan variasi metode, media, dan bentuk penugasan sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Selain itu, asesmen diagnostik dilaksanakan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sehingga guru dapat merancang strategi pembelajaran lebih tepat.

Implementasi Merdeka Belajar diwujudkan melalui pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)**.** Program ini memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk belajar melalui pengalaman nyata, bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar, serta mengembangkan karakter sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah secara aktif memberikan pendampingan kepada guru melalui supervisi akademik, rapat koordinasi, serta pelatihan internal. Guru juga didorong untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai sarana berbagi praktik baik dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards (1980), implementasi Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin telah memenuhi empat indikator utama. Dari aspek komunikasi, kebijakan disosialisasikan secara rutin melalui rapat dan pelatihan sehingga guru memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaannya. Dari aspek sumber daya, sekolah memiliki tenaga pendidik dan sarana pembelajaran yang cukup memadai meskipun masih memerlukan peningkatan pada fasilitas teknologi. Dari aspek disposisi, kepala sekolah dan guru menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas memudahkan koordinasi serta pembagian tugas dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar.

Implementasi kebijakan yang berjalan secara terencana menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Merangin telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.

A. Dampak Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar terhadap Mutu Pendidikan

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMAN 2 Merangin memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut terlihat dari perubahan pada proses pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, motivasi belajar peserta didik, serta budaya sekolah yang semakin kolaboratif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada perubahan kurikulum, tetapi juga pada transformasi budaya

belajar di lingkungan sekolah. Dari aspek proses pembelajaran, guru mulai menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Peserta didik tidak lagi hanya menerima materi secara pasif, tetapi diberikan kesempatan untuk berdiskusi, memecahkan masalah, melakukan presentasi, dan mengembangkan kreativitas melalui pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya (Suparsawan, 2020). Selain itu, penerapan asesmen diagnostik memberikan manfaat bagi guru dalam mengenali kemampuan awal peserta didik. Informasi tersebut digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena mempertimbangkan perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar.

Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Melalui berbagai kegiatan proyek, peserta didik belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kritis, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Kegiatan tersebut mendukung terbentuknya peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari sisi pendidik, implementasi Merdeka Belajar mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, lokakarya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan komunitas belajar. Guru menjadi lebih terbuka terhadap inovasi pembelajaran serta lebih kreatif dalam memilih metode, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (Saptorini et al., 2024).

Jika dianalisis menggunakan konsep *Total Quality Management* (TQM) dalam pendidikan menurut Edwards (1980), implementasi Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin menunjukkan adanya upaya perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan tersebut terlihat melalui evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara rutin, pengembangan kompetensi guru, peningkatan kualitas layanan

pendidikan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya belajar yang berkualitas.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Keberhasilan implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Salah satu faktornya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan melalui supervisi akademik, koordinasi, dan pembinaan kepada guru. Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga guru lebih termotivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Faktor pendukung lainnya adalah komitmen guru dalam meningkatkan kompetensi profesional. Guru secara aktif mengikuti pelatihan, lokakarya, dan komunitas belajar untuk memperdalam pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, jaringan internet, dan media pembelajaran turut mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih efektif.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat. Perbedaan tingkat kesiapan guru dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Tidak semua guru memiliki kemampuan sama mengembangkan modul ajar, memanfaatkan teknologi, melaksanakan asesmen sesuai karakteristik peserta didik.

Keterbatasan fasilitas teknologi menjadi tantangan, terutama terkait ketersediaan perangkat digital dan kualitas jaringan internet yang belum selalu stabil. Selain itu, perubahan paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memerlukan proses adaptasi yang cukup panjang bagi sebagian guru dan peserta didik. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, sekolah terus berupaya melakukan perbaikan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan komunitas belajar guru, peningkatan koordinasi antarwarga sekolah, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen sekolah untuk terus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

Analisis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan proses pembelajaran yang lebih aktif, meningkatnya kompetensi guru, serta berkembangnya budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edwards (1980) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung.

Komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan mempermudah penyampaian informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten, meskipun masih perlu ditingkatkan, menjadi modal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap positif guru terhadap perubahan serta adanya pembagian tugas yang jelas di lingkungan sekolah juga mendukung keberhasilan implementasi program. Temuan penelitian ini juga menguatkan konsep mutu pendidikan menurut Edwards (1980) yang menekankan pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Implementasi Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar, tetapi peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, pembentukan karakter peserta didik, serta penguatan budaya mutu di sekolah.

Keseluruhan, implementasi kebijakan Merdeka Belajar telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Merangin. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan komitmen bersama dari seluruh warga sekolah, dukungan pemerintah, serta evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan Merdeka Belajar dapat tercapai secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Merangin telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Implementasi kebijakan diwujudkan

melalui penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), asesmen diagnostik, serta pengembangan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan pelatihan dan komunitas belajar.

Penerapan kebijakan Merdeka Belajar berdampak meningkatnya kualitas proses pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, kebijakan ini turut meningkatkan kompetensi guru merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, memperkuat motivasi belajar, serta membangun budaya sekolah kolaboratif, adaptif terhadap perubahan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan beberapa kendala, seperti perbedaan kesiapan guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan perlunya peningkatan kompetensi digital pendidik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Merdeka Belajar perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas pembelajaran memadai, penguatan kepemimpinan kepala sekolah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan langkah itu, kebijakan Merdeka Belajar mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy.* Congressional Quarterly Press.

Manurung, A. A., Elvina, Zaitun, & Khairiah, S. (2026). Literatur Review: Konsep Student Centered Learning Dalam Desain Pembelajaran PAI Abad 21. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2026.005.02.03

Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2021). *Qualitative DAta Analysis: A Methods Sourcebook*. Publications, SAGE.

Muhsam, J., Cakranegara, P. A., Krisnadwipayana, U., Kupang, U. M., & Presiden, U. (2022). Analisis Pentingnya Pembangunan Pendidikan Karakter Siswa Dalam

Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia di SMP Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *7*(2), 255–262.

Neliwati, Wahyudi, Siregar, K. A., & Mar'i, Z. (2026). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Mutu di SMP IT Al Kaffah Binjai. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, *11*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jkps.v11i1.1487

Saptorini, P., Rubini, B., & Suhardi, E. (2024). *Transformasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Kurikulum Merdeka*. Rizmedia Pustaka Indonesia.

Suparsawan, I. K. (2020). *Kolaborasi Pendekatan Saintifik Dengan Model Pembelajaran STAD Geliatkan Peserta Didik*. Tata AKbar.